

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Pengendalian Internal Pendapatan Asli Daerah”. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam lingkup struktur organisasi pada Dinas PPKAD Kabupaten Manokwari, terdapat pembagian tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005. Namun, dalam prakteknya, masih memerlukan beberapa penambahan seksi pada sub bidang pengelolaan kas. Dengan harapan bahwa ketika penambahan seksi tersebut dilaksanakan secara konsekuen, maka pengendalian intern pada seksi penerimaan dapat berjalan dengan optimal.
- b. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor langsung melalui bendahara penerimaan (kas daerah) sudah cukup baik, hanya masih perlu diperbaiki karena terdapat kelemahan pada bagian bendahara penerimaan, dimana bagian tersebut mengambil alih kewajiban/tugas wajib pajak/wajib retribusi dalam menyampaikan dokumen kepada bagian bendahara penerimaan SKPD.
- c. Formuli-formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, dan bank pemerintah sudah cukup baik. Hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu penambahan Tanda Bukti Pembayaran dan untuk kepentingan arsip, guna menunjang pengendalian intern khususnya pada Sub Bidang Pengel-

olaan Kas di Dinas PPKAD Kabupaten Manokwari, dan pada instansi yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah, pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada struktur organisasi sebaiknya dilakukan penambahan seksi pada bidang pengelolaan kas dengan maksud agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyetoran pendapatan asli daerah. Bidang pengelolaan kas dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:
 - b. Seksi pelaksanaan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya; dan
 - c. Seksi pelaksanaan penyimpanan dan penyetoran ke bank.
2. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor langsung melalui bendahara penerimaan (Kas Daerah), hendaknya diperbaiki pada bagian bendahara penerimaan yaitu menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran kepada wajib pajak/wajib retribusi sebelum disampaikan kepada bagian bendahara penerimaan SKPD, dan bukan demi alasan kepraktisan semata.
3. Formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, dan bank pemerintah, hendaknya segera disempurnakan, terutama berkaitan dengan penambahan Surat Tanda Bukti Pembayaran untuk kepentingan arsip, guna menunjang pengendalian intern pada system akuntansi pen-

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

erimaan kas pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- DariseNurlan. 2009. *PengelolaanKeuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks.
- Halim Abdul, Restianto E Yanuar, Karman I Wayan. 2010. *SistemAkuntansiSektorPublik*. Yogyakarta :SekolahTinggiIlmuManajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narko. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Yayasan PustakaNegara.
- Prasetyawan Yosep, Yudhi. 2010. *Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar)*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Simamora, Hendry. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Jilid I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, SR. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 2, Edisi 5 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supardi, M.d, 2006. *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press.
- Sudaryarsih, Nuning. 2007. *Sistem Akuntansi Penjualan Tunai dan Penerimaan Kas Dalam Menunjang Pengendalian Intern (Studi Pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang)*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Waraningsih, Ajeng. 2005. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pelayanan Rawat Inap untuk Meningkatkan Pengendalian Intern pada R.S.U. D.R. Saiful Anwar Malang*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.

PERATURAN UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

